

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Yogyakarta sebanyak 34 SKPD yang terdiri dari:

NO	NAMA SKPD
1	Sekretariat Daerah
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Dinas Komunikasi nformatika dan Persandian
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pendidikan
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
9	Dinas Kebudayaan
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
12	Dinas Sosial
13	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Dinas Pertanahan dan Tata Aruang
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Dinas Pertanian dan Pangan
17	Dinas Kebakaran
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Lingkungan Hidup
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Bagian Layanan Pengadaan

25	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
26	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
27	Bagian Organisasi
28	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
29	Bagian Umum
30	Bagian Protokol
31	Bagian Hukum
32	Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat
33	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian
34	Staf Ahli Walikota Bidang Umum

Sampel adalah Kepala Dinas atau Kepala Badan, Sekertaris dan Pejabat pengelola keuangan. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari subjeknya. Data primer disebut juga data asli atau data baru (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan secara langsung. Setiap SKPD diberikan 5 kuesioner dengan komposisi: Kepala Dinas (1 kuesioner), Sekertaris (1 kuesioner) dan Pejabat Pengelola Keuangan (3 kuesioner).

#### 1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.1 dari 170 kuesioner yang disebar, hanya 147 kuesioner yang kembali. Semua kuesioner yang kembali dapat diolah.

Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 147 kuesioner. Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah Kuesioner yang Disebar dan Kuesioner yang Kembali**

	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	170	100%
Kuesioner Kembali	147	98%
Kuesioner yang dapat diolah	147	98%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

## 2. Demografi Responden

Dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa karakteristik responden untuk memudahkan dalam mengidentifikasi responden. Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden yang dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja dan jabatan.

### a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2.**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	. Laki-laki	86	58%
2	Perempuan	61	42%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

Jenis kelamin responden dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini paling banyak responden berjenis kelamin laki-laki. Responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 61 orang atau 42% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 86 orang atau 58% dari total jumlah responden.

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3.**  
**Responden Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	21-30 tahun	20	14%
2	31-40 tahun	74	50%
3	41-50 tahun	33	23%
4	>50tahun	20	13%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa untuk responden dengan usia 21 – 30 tahun berjumlah 20 orang atau 14% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk responden dengan rentang usia antara 31 – 40 tahun berjumlah 74 orang atau 50%. Untuk responden dengan usia antara 41 – 50 tahun terdapat 33 orang atau 23%. Dan untuk responden dengan usia 50 tahun ke atas berjumlah 20 orang atau 13%.

c. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 4.4.**  
**Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	-	
2	Diploma	27	18%
3	Sarjana	105	72%
4	Pascasarjana	15	10%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

Karakteristik responden berdasarkan pendidikannya terdiri dari 4 kelompok, yaitu SMA, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Berdasarkan pendidikannya responden dalam penelitian paling banyak adalah Sarjana. Responden dengan pendidikan sarjana sebanyak 94 orang atau 69% dari total responden. Sedangkan untuk tingkat SMA adalah sebanyak 0. Kemudian untuk tingkat Diploma sebanyak 27 orang atau 20%. Dan untuk tingkat pasca sebanyak 15 orang atau 11% dari jumlah total responden yang dilakukan dalam penelitian ini.

d. Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 4.5.**  
**Responden Berdasarkan Masa Kerja**

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	<1 tahun	-	-
2	1-5 tahun	74	55%
3	5 tahun>	73	45%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

Karakteristik responden berdasarkan masa kerjanya terdiri dari 3 kelompok, yaitu <1 tahun, 1-5 tahun, 5 tahun>. Berdasarkan masa kerjanya responden dalam penelitian paling banyak adalah 1-5 tahun yaitu sebanyak 74 atau 55%. Responden dengan masa kerja 5 tahun> sebanyak 68 orang atau 42% dari total responden. Sedangkan untuk masa kerja <1 tahun adalah sebanyak 5 atau 3% dari presentase total.

e. Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6.**  
**Responden Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Dinas	30	20%
2	Sekretaris	32	21%
3	Pejabat Pengeola Keuangan	85	59%

*Sumber: Data primer diolah tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa untuk responden dengan jabatan kepala dinas berjumlah 30 orang atau 20% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk responden dengan jabatan sekretaris berjumlah 32 orang atau 21%. Untuk responden dengan jabatan pejabat pengelola keuangan terdapat 85 orang atau 59%.

## **B. Uji Kualitas Data**

### **1. Uji Validitas**

Uji Validitas merupakan pengujian untuk mengukur tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid atau dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004 dalam Nazaruddin dan Basuki, 2015). Data penelitian ini dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya ada pada objek yang diteliti dan dengan melihat nilai *loading factor* dari tabel *component matrix*, apabila

*component matrix* pada masing-masing item menunjukkan hasil diatas 0,5 maka artinya item tersebut valid, apabila menunjukkan kurang dari 0,5 maka item tersebut tidak valid. Uji validitas pada instrument ini dilakukan dengan menggunakan Uji KMO dan Bartlett's

a. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

**Tabel 4.7.**  
**Uji Validitas Variabel Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah**

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	0,831	AP 1	0,790	Valid
		AP 2	0,713	Valid
		AP 3	0,688	Valid
		AP 4	0,692	Valid
		AP 5	0,693	Valid
		AP 6	0,564	Valid
		AP 7	0,666	Valid
		AP 8	0,722	Valid
		AP 9	0,708	Valid
		AP 10	0,734	Valid
		AP 11	0,753	Valid
		AP 12	0,788	Valid
		AP 13	0,767	Valid
		AP 14	0,733	Valid

Sumber: Output SPSS 2018

Berdasarkan table 4.7 diketahui nilai KMO sebesar 0,831.

Hal tersebut menandakan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah valid karena telah memenuhi batas 0,50 ( $0,831 > 0,50$ ).



Nilai Loading factor dari seluruh item menunjukkan nilai yang besar yaitu diatas 0,50. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa 14 item tersebut adalah valid.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

**Tabel 4.8.**  
**Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,849	AK 1	0,740	<b>Valid</b>
		AK 2	0,898	<b>Valid</b>
		AK 3	0,904	<b>Valid</b>
		AK 4	0,864	<b>Valid</b>
		AK 5	0,778	<b>Valid</b>
		AK 6	0,893	<b>Valid</b>
		AK 7	0,811	<b>Valid</b>
		AK 8	0,719	<b>Valid</b>

Sumber: Output SPSS 2018

Berdasarkan table4.8 diketahui nilai KMO sebesar 0,849. Hal tersebut menandakan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan adalah valid karena telah memenuhi batas 0,50 ( $0,849 > 0,50$ )

Nilai *Loading factor* dari seluruh item menunjukkan nilai yang besar yaitu diatas 0,50. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa 8 item tersebut adalah valid.

## c. Transparansi Pengelolaan Keuangan

Tabel 4.9.

## Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,834	TR 1	0,868	<b>Valid</b>
		TR 2	0,916	<b>Valid</b>
		TR 3	0,839	<b>Valid</b>
		TR 4	0,948	<b>Valid</b>
		TR 5	0,919	<b>Valid</b>
		TR 6	0,930	<b>Valid</b>

Sumber: Output SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui nilai KMO sebesar 0,834 Hal tersebut menandakan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan adalah valid karena telah memenuhi batas 0,50 ( $0,834 > 0,50$ )

Nilai *Loading factor* dari seluruh item menunjukkan nilai yang besar yaitu diatas 0,50. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa 6 item tersebut adalah valid.

## d. Kinerja Pemerintah

**Tabel 4.10.**  
**Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah**

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Kesimpulan
Kinerja Pemerintah	0,799	KN 1	0,607	<b>Valid</b>
		KN 2	0,505	<b>Valid</b>
		KN 3	0,664	<b>Valid</b>
		KN 4	0,650	<b>Valid</b>
		KN 5	0,734	<b>Valid</b>
		KN 6	0,911	<b>Valid</b>
		KN 7	0,908	<b>Valid</b>
		KN 8	0,919	<b>Valid</b>
		KN 9	0,913	<b>Valid</b>
		KN 10	0,918	<b>Valid</b>

Sumber: Output SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui nilai KMO sebesar 0.799. Hal tersebut menandakan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan adalah valid karena telah memenuhi batas 0,50 ( $0,799 > 0,50$ )

Nilai Loading factor dari seluruh item menunjukkan nilai yang besar yaitu diatas 0,50. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa 10 item tersebut adalah valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tingkat konsistensi dari instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas pada instrument ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 2.0. Dalam melakukan pengujian reliabilitas instrument penelitian, menggunakan Uji Cronbach Alpha. Instrument penelitian dikatakan memiliki reliabilitas yang memadai apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

### a) Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah

**Tabel 4.11.**  
**Uji Reliabilitas Peran APIP**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	0,924	Reliabel	<b>Reliabilitas Tinggi</b>

*Sumber: Output SPSS 2018*

Berdasarkan data uji reliabilitas pada tabel 4.11, item pertanyaan variabel peran APIP menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,924. Hal ini menunjukkan bahwa nilai reliabilitas tinggi dan item reliabel untuk digunakan dalam penelitian, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 ( $0,924 > 0,60$ ).

## b) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

**Tabel 4.12.**  
**Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,907	Reliabel	<b>Reliabilitas Tinggi</b>

*Sumber: Output SPSS 2018*

Berdasarkan data uji reliabilitas pada tabel 4.12, item pertanyaan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan bahwa nilai reliabilitas tinggi dan item reliabel untuk digunakan dalam penelitian, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 ( $0,907 > 0,60$ ).

## c) Transparansi Pengelolaan Keuangan

**Tabel 4.13.**  
**Uji Reliabilitas Transparansi Pengelolaan Keuangan**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,945	Reliabel	<b>Reliabilitas Tinggi</b>

*Sumber: Output SPSS 2017*

Berdasarkan data uji reliabilitas pada tabel 4.13, item pertanyaan variabel transparansi pengelolaan keuangan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,945. Hal ini menunjukkan bahwa

nilai reliabilitas tinggi dan item reliabel untuk digunakan dalam penelitian, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 ( $0,945 > 0,60$ ).

d) Kinerja Pemerintah

**Tabel 4.14.**  
**Uji Reliabilitas Kinerja Pemerintah**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
Kinerja Pemerintah	0,922	Reliabel	<b>Reliabilitas Tinggi</b>

*Sumber: Output SPSS 2017*

Berdasarkan data uji reliabilitas pada tabel 4.14, item pertanyaan variabel kinerja pemerintah menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,922. Hal ini menunjukkan bahwa nilai reliabilitas tinggi dan item reliabel untuk digunakan dalam penelitian, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 ( $0,922 > 0,60$ ).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual atau pengganggu berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Data yang dianggap baik adalah jika residual data terdistribusi normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan residual data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Nazaruddin dan Basuki,2017).Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dari pengujian ini jika nilai Asymp.sig (2-tailed)lebih besar dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi secara normal (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.15.**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>Kolmogorov -Smirnov</b>	<b>Nilai Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Unstandardized Residual	0,563	<b>Data Normal</b>

*Sumber: Output SPSS 2017*

Hasil dari uji normalitas dengan *menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dan diolah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dengan uji VIF dari nilai Variance Inflation Factors (VIF) dengan kriteria pengujian yaitu apabila  $VIF < 10$  atau nilai tolerance  $> 0,1$  maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil dari ujimultikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.16.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai <i>Tolerance</i></b>	<b>Nilai <b>VIF</b></b>	<b>Keterangan</b>
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	0,998	1,000	<b>Bebas Multikolinieritas</b>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,458	2,182	<b>Bebas Multikolinieritas</b>
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,458	2,182	<b>Bebas Multikolinieritas</b>

*Sumber: Output SPSS 2017*

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,1$ . Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel-variabel tersebut.



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah adanya kesamaan varian dari residual pada semua pengamatan dari model regresi penelitian (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, karena dalam model regresi mempunyai syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji park. Kriteria pada pengujian ini apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.17.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	0,513	<b>Bebas Heteroskedastisitas</b>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,394	<b>Bebas Heteroskedastisitas</b>
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,264	<b>Bebas Heteroskedastisitas</b>

*Sumber: Output SPSS 2017*

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig  $> 0,05$

sehingga pada model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

### C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui pengaruh peran APIP, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.18.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
APIP	147	50,00	70,00	59,69	5,218
AKUNTABILITAS	147	29,00	40,00	34,04	2,718
TRANSPARANSI	147	21,00	30,00	26,27	2,924
KINERJA	147	37,00	50,00	42,79	3,767

*Sumber: Output SPSS 2017*

Dari tabel 4.18 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel peran APIP menggunakan jumlah sample sebanyak 147 responden. Pada variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 50

dan nilai maksimum 70. Rata-rata total jawaban responden sebesar 59,69 di atas angka median 56. Sehingga dapat disimpulkan bahwa APIP memiliki peran terhadap kinerja pemerintah di kota Yogyakarta cukup tinggi. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 5,218 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan jumlah sample sebanyak 147 responden. Pada variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum 40. Rata-rata total jawaban responden sebesar 34,04 di atas angka median 32. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki peran terhadap kinerja pemerintah di kota Yogyakarta cukup tinggi. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 2,718 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel transparansi pengelolaan keuangan menggunakan jumlah sample sebanyak 147 responden. Pada variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum 30. Rata-rata total jawaban responden sebesar 26,27 di atas angka median 24. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan memiliki peran terhadap kinerja pemerintah di kota Yogyakarta cukup tinggi. Selain itu

juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 2,924 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel kinerja pemerintah menggunakan jumlah sample sebanyak 147 responden. Pada variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum 50. Rata-rata total jawaban responden sebesar 42,79 diatas angka median 40. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 2,924 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

## 2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )

Pengujian ini berguna untuk mencari tahu bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen.  $R^2$  dapat diketahui dengan melihat nilai Adjusted  $R^2$ , untuk mengetahui besarnya nilai  $R^2$  harus diubah terlebih dahulu dalam persentase. Sisa persentase menunjukkan seberapa besar variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.19.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,540 <sup>a</sup>	,292	,277	3,20264

Sumber: Output SPSS 2017

Nilai koefisien determinasi pada tabel 4.19 adalah 0,277 atau 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah dipengaruhi oleh Peran APIP, Akuntabilitas dan Transparansi hanya sebesar 27,7%, sedangkan sisanya sebesar 72,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini tergolong kecil, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel yang dipilih memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel hasil uji signifikansi simultan (Uji F), namun variabel tersebut memiliki dampak rendah terhadap kinerja pemerintah.

### 3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tujuan uji ini adalah untuk menjelaskan variabel independen secara bersamaan pada variabel dependen. Bila nilai sig < 0,05, yang menjelaskan kemampuan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.20.**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	605,141	3	201,714	19,666	,000 <sup>b</sup>
Residual	1466,736	144	10,257		
Total	2071,878	147			

*Sumber: Output SPSS 2017*

Berdasarkan pada tabel 4.20 maka diketahui bahwa nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  sehingga hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Peran APIP dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah.

#### 4. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tujuan uji ini untuk mencari tahu pengaruh variabel independen secara parsial menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria hipotesis diterima bilai nilai signifikansi  $< \alpha$  dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.21 .**  
**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	37,233	4,508	,000
APIP	,246	,052	,000
AKUNTABILITAS	,208	,065	,000
TRANSPARANSI	,172	,036	,000

*Sumber: Output SPSS 2017*

Persamaan dari regresi linear berganda dari tabel 4.21 diatas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathbf{KN = 37,233 + 0.246AP + 0,208AK + 0,172TR + e}$$

Berdasarkan hasil pada tabel 4.21 dan persamaan dari regresi linear maka disimpulkan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 37,233 menyatakan bahwa jika variabel independen nilainya adalah 0, maka kinerja pemerintah nilainya adalah sebesar 37,233

- a. Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kinerja Pemerintah

Nilai Signifikan Variabel Peran APIP (AP) terhadap Kinerja Pemerintahan (KN) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Peran APIP (AP) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Koefisien regresi AP (Peran APIP) sebesar 0,246(positif) dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Peran APIP mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi peran APIP maka akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

- b. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah.

Nilai Signifikan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (AK) terhadap Kinerja Pemerintahan (KN) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (AK) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Koefisien regresi AK (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan) sebesar 0,208 (positif) dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.

c. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah

Nilai Signifikan variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan (TR) terhadap Kinerja Pemerintahan (KN) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan (TR) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Koefisien regresi TR (Transparansi Pengelolaan Keuangan) sebesar 0,172 dari semua faktor yang diteliti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi



Pengelolaan Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini menyatakan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) diterima.

Dari uji hipotesis yang disajikan diatas maka dapat diambil kesimpulan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.22.**  
**Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
H <sub>1</sub>	Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>
H <sub>2</sub>	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>
H <sub>3</sub>	Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Pemerintah	<b>Diterima</b>

#### **D. Pembahasan**

##### 1. Pengaruh Peran APIP terhadap Kinerja Pemerintah

###### Aparat Pengawas Intern

Pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemerintahan harus mengacupada prinsip-prinsip yang berlaku dan ketentuan yang ada dalam organisasi auditor internal pemerintahan (Basuki, 2016).

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di kota Yogyakarta masih dianggap sebagai tokoh antagonis yang mencari celah kesalahan yang dilakukan SKPD/Unit Kerja. Selama ini hubungan yang terbangun antara APIP dan SKPD/Unit kerja masih satu arah, APIP masih menjadi *watch dog* yang secara reaktif mengungkap penyelewengan yang ada di SKPD.

Kapabilitas APIP di Yogyakarta saat ini menempati level 2, yaitu mampu menjalin proses sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dimana seharusnya pemerintah kota Yogyakarta dapat menempati level 3 yaitu mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern ([www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id))

Pada penelitian ini menguji keterkaitan antara peran aparat pengawas intern pemerintah dengan kinerja pemerintah. Peran APIP yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi peran APIP maka akan semakin baik kinerja pemerintah

Hasil penelitian pengaruh Peran APIP terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa Peran APIP akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran APIP maka semakin baik Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Darmawiguna (2017) yang menyatakan bahwa Peran APIP berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP di kota Yogyakarta, kemudian APIP dapat menempati level 3 dan mampu meningkatkan kinerja SKPD/Unit Kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta

## 2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menurut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, pemerintahan kota Yogyakarta memperoleh predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas masih belum maksimal dipemerintahan kota Yogyakarta,

dan juga pada 3 Kabupaten yang berada pada Provinsi DIY yaitu, Sleman, Kulon Progo dan Bantul (LAKIP,2016).

Pada tahun 2017 kota Yogyakarta kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Walaupun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan keuangan untuk tahun anggaran 2016 sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan daerah. Sejumlah temuan tersebut diantaranya adalah tunggakan pajak reklame, tunggakan pajak hotel, dan tunggakan retribusi sampah(Tribunnews,2016).

Pada penelitian ini menguji keterkaitan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kinerja pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan maka akan semakin baik kinerja pemerintah

Hasil penelitian pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin Akuntabilitass Pengelolaan Keuangan maka semakin baik

Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Puranama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga tidak terdapat temuan-temuan yang merugikan negara dan mempertahankan predikat tertinggi yang telah diraih.

### 3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik (Purnama dan Nadirsyah, 2016)

Pada tahun 2016 kota Yogyakarta kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Walaupun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan transparansi pada tahun 2016

sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan daerah. Sejumlah temuan tersebut diantaranya adalah operasi yang berbelit, suap menyuap, tidak transparan.(Tribunnews,2016)

Penelitian ini menguji keterkaitan antara transparansi pengelolaan keuangan dengan kinerja pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan yang besar sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin tinggi Transparansi Pengelolaan Keuangan maka akan semakin baik kinerja pemerintah

Hasil penelitian pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah dengan menggunakan uji signifikansi dan koefisien beta variabel menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan pemerintah akan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pemerintah kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin Transparansi Pengelolaan Keuangan maka semakin baik Kinerja Pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Puranama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah.

Hasil tersebut diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga tidak

terdapat temuan-temuan yang merugikan negara dan mempertahankan predikat tertinggi yang telah diraih.